

Politik Identitas Anak Muda Minoritas: Ekspresi Identitas Anak Muda Tionghoa melalui Dua Organisasi Anak Muda Tionghoa di Surakarta Pasca Orde Baru

Yosafat Hermawan Trinugraha^{*)}

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang dinamika identitas anak muda Tionghoa yang terepresentasikan melalui dua organisasi anak muda Tionghoa di Kota Surakarta. Solo *Youth Club* (SYC) dan Hoo Hap *Youth club* (HYC) adalah dua organisasi yang muncul pasca Orde Baru. Dalam tulisan ini terlihat bahwa melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh dua organisasi tersebut, tampak sebuah usaha untuk memunculkan identitas lain dari yang selama ini dikonstruksi dan dilabelkan kepada etnis Tionghoa secara umum. Politik identitas yang dilakukan oleh SYC dan HYC antara lain terepresentasikan lewat kegiatan-kegiatan sosial yang secara umum berusaha mencairkan dan mendekatkan jarak sosial dengan kelompok masyarakat non Tionghoa. Namun demikian, berbagai paradoks pun hadir bersamaan dengan usaha-usaha tersebut, seperti pola karitatif yang berpotensi akan menjebak dan melanggengkan stereotype yang selama ini ada. Selain juga memungkinkannya terjadinya relasi kuasa antara generasi tua dengan generasi muda di kalangan etnis Tionghoa dalam dua organisasi Tionghoa tersebut.

Kata Kunci: *politik Identitas, anak muda, etnis Tionghoa*

ABSTRACT

This article examines the dynamic of Chinese youth identity represented through two Chinese youth organisations in Surakarta. Solo Youth club (SYC) and Hoo Hap Youth club (HYC) are two organisations that have emerged post new order. This article shows activities conducted by these two organisations can be seen as an attempt to uncover other identities which to date have only been constructed and labelled as the general ethnic Chinese. Political identification carried out by SYC and HYC, among others, represents attempts to melt and close the social distance with non-Chinese community groups via various social activities. However a number of paradoxes also emerge, such as the charitable pattern that potentially traps and perpetuates old stereotypes. In addition it also allows for the emergence of power relations between the older generation and younger generation of ethnic Chinese within the two organisations.

Keywords: politic identity, youth, chinese etnic

* Penerima Hibah Riset Studi Kepemudaan (HRSK) dari YouSure untuk Kategori Senior. Yosafat Hermawan Trinugraha adalah dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi FKIP UNS.

PENDAHULUAN

Secara historis, peristiwa kekerasan terhadap masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia telah banyak terjadi. Di Surakarta dan sekitarnya, dari 15 konflik sosial besar yang pernah terjadi selama hampir seabad terakhir, setidaknya separuh peristiwa diwarnai konflik rasial yang melibatkan etnis Tionghoa sebagai sasaran (Soedharmono, 2006). Peristiwa kekerasan besar terakhir terjadi pada tanggal 12-14 Mei 1998 (selanjutnya disebut peristiwa Mei 1998), sesaat menjelang masa reformasi digulirkan dan kekuasaan Orde Baru mulai turun. Peristiwa bernuansa rasial tersebut terjadi di Jakarta, Medan, Surabaya, Surakarta, dan beberapa kota lain di Indonesia.

Tulisan ini akan mengkaji bagaimana dinamika proses pembentukan/ pergeseran/ perubahan identitas anak muda keturunan etnis Tionghoa di Surakarta pasca-peristiwa Mei 1998. Anak muda menjadi subjek utama penelitian karena mereka adalah ujung tombak kehidupan generasi di masa mendatang. Karena itu, bagaimana saat ini anak muda mengidentifikasi dirinya dalam kehidupan masyarakat menjadi penting untuk ditelusuri. Kurun waktu penelitian dipilih pasca-peristiwa Mei 1998, karena dalam peristiwa yang terjadi 14 tahun lalu tersebut, keluarga-keluarga keturunan etnis Tionghoa menjadi korban utama kekerasan. Anak-anak yang pada masa itu menjadi saksi sekaligus korban peristiwa kekerasan yang dialami keluarganya, saat ini sudah beranjak dewasa dan sedang berproses membentuk sebuah identitas tertentu dalam diri mereka.

Secara khusus, tulisan ini berusaha menelusuri identitas seperti apa yang menjadi pilihan anak muda keturunan etnis Tionghoa di Surakarta, mengapa mereka memilih identitas tersebut, bagaimana mereka mengekspresikan pilihan identitasnya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana

proses pembentukan identitas tersebut berkaitan erat dengan konteks sosial dan budaya masyarakat secara makro, khususnya pasca-peristiwa Mei 1998. Melalui kasus dua organisasi anak muda Tionghoa yang muncul pasca 1998, tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara. Dalam prosesnya peneliti akan mengamati ekspresi-ekspresi keseharian anak muda khususnya di dua organisasi anak muda Tionghoa yaitu *Solo Youth club* dan *Hoo Hap Youth club*. Melalui pengamatan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang bagaimana dinamika proses pembentukan dan gerak identitas anak muda keturunan Tionghoa di Surakarta pasca-peristiwa Mei 1998.

Tulisan ini secara garis besar dibagi ke dalam bagian pendahuluan, pembahasan data, dan kesimpulan serta penutup. Pada bagian pendahuluan meliputi latar belakang, eksplorasi tentang konsep identitas, etnisitas dan anak muda Tionghoa. Pada bagian pemaparan data akan mulai menganalisis tentang makna peristiwa Mei 1998 bagi anak muda Tionghoa di Surakarta dan keberadaan anak muda Tionghoa yang sudah tak lagi mengenal tradisi, serta deskripsi tentang dua organisasi Tionghoa di Kota Surakarta, yaitu *Solo Youth club* (SYC) dan *Hoo Hap Youth club* (HYC). Kemudian pada bagian kesimpulan dan penutup meliputi analisis tentang politik identitas dalam organisasi SYC dan HYC dan penutup.

IDENTITAS, ETNISITAS DAN ANAK MUDA TIONGHOA: TINJAUAN KONSEPTUAL

Anthony Giddens (melalui Barker, 2004: 171) mendefinisikan identitas diri sebagai apa yang kita pikirkan tentang diri pribadi.

Apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri tersebut berubah dari satu situasi ke situasi yang lain menurut ruang dan waktunya. Pandangan ini melatarbelakangi Giddens dalam menyebut identitas sebagai sebuah proyek, yaitu sesuatu yang kita ciptakan, sesuatu yang selalu dalam proses, suatu gerak maju ketimbang sesuatu yang datang kemudian.

Pengertian identitas dalam kajian sosiologi kontemporer tak lagi dipahami sebagai sesuatu yang beku, tetap, tak berubah. Identitas dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial yang dibentuk terus-menerus oleh masyarakat dan senantiasa mengalami perkembangan (Thung Ju Lan, 2001:170). Merunut pada pengertian tersebut, identitas “Cina” atau “Tionghoa” sebenarnya bukan sesuatu yang sudah selesai atau memiliki pengertian tunggal dan tetap. Identitas akan bergerak dan berkembang seiring perubahan ruang dan waktu.

Sementara itu, dalam kajian sosiologi, etnisitas dibedakan dari ras, kelas, dan status sosial yang merupakan salah satu jenis dari unsur stratifikasi sosial masyarakat. Menurut Giddens (1993:741), etnisitas dipahami sebagai nilai-nilai dan norma-norma budaya yang membedakan anggota-anggota dari kelompok yang ada dengan kelompok lainnya.

Saat ini, kajian tentang etnisitas berkaitan erat dengan kajian tentang identitas. Para pemikir kajian budaya memahami bahwa etnisitas tidak didasarkan atas ikatan primordial atau karakteristik budaya universal yang dimiliki oleh kelompok tertentu, melainkan sesuatu yang terbentuk melalui praktik diskursif. Dalam hal ini, apa yang kita pikir sebagai identitas kita tergantung pada apa yang kita pikir bukan bagian dari kita (Barker, 2004:201).

Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia, mengalami pasang-surut relasi dengan mereka yang sering disebut “penduduk asli” atau “pribumi”. Tercatat dalam

sejarah, bagaimana etnis Tionghoa di Indonesia banyak terlibat (entah sebagai pelaku maupun korban) dalam peristiwa kekerasan. Berbagai peristiwa kekerasan tersebut seolah mengkonstruksi ingatan kolektif masyarakat tentang keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia sebagai sesuatu yang “berbeda” dengan mereka yang bukan Tionghoa. Selanjutnya kita bisa mengatakan bahwa etnis Tionghoa adalah salah satu etnis yang ada di Indonesia, yang keberadaannya seringkali dianggap “berbeda” dari etnis lainnya. Pandangan ini tentu berkaitan dengan *stereotype* yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia.

Anak muda dalam bingkai kajian budaya, tidak hanya dilihat sebagai sebuah kategori biologis, melainkan sebuah kategori budaya. Menurut Barker (2000:335-336), sebagai satu konstruk budaya, makna pemuda bergeser menurut ruang dan waktu berdasarkan atas siapa disebut oleh siapa. Pemuda adalah satu konstruk diskursif, di mana ia dibentuk oleh cara terorganisasi dan terstruktur kita berbicara dan bagaimana mewujudkan pemuda sebagai kategori orang, dan yang lebih penting adalah diskursus tentang gaya, citra, perbedaan dan identitas.

Mengkaji masalah anak muda Tionghoa di Indonesia, tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia secara umum. Konstruksi sosial yang dibangun secara historis sejak jaman kolonial, telah menempatkan etnis Tionghoa di Indonesia sebagai warga yang dianggap bukan “asli” atau bukan “pribumi”. Kategori tentang pribumi dan non pribumi tersebut, kemudian secara diskursif seringkali dimanfaatkan dalam berbagai peristiwa politik, termasuk pada Kerusuhan Mei 1998 yang menempatkan warga keturunan Tionghoa sebagai korban kekerasan.

Anak muda Tionghoa yang hidup pada masa sekarang, akan sangat mungkin ber-

beda identitasnya dengan generasi keturunan Tionghoa sebelumnya. Thung Ju Lan (2001:186-187) menggambarkan bagaimana generasi muda Tionghoa yang lahir pada tahun 1960-an dan 1970-an lebih mengidentifikasi diri mereka sebagai ‘golongan menengah yang profesional’ daripada sebagai ‘keturunan Tionghoa’. Sebagian besar dari mereka telah lepas dari ikatan tradisi dan adat-istiadat leluhur, karena sudah berganti agama (menjadi Kristen atau Islam) dan karena perkawinan campur dengan laki-laki atau perempuan pribumi. Bagi mereka umumnya identitas ke-Tionghoa-an hanya dikarenakan hubungan darah saja.

Secara lebih spesifik, Chang You Hoon (2012) mencoba mengidentifikasi bagaimana anak muda Tionghoa memiliki perbedaan orientasi dalam berorganisasi dibandingkan dengan mereka yang lebih tua, khususnya dalam hal konsern dan isu organisasi yang diambil. Dalam konteks ini, generasi tua mendominasi panggung organisasi-organisasi Tionghoa berbasis etnis pada masa pasca Orde Baru, sementara generasi muda lebih aktif dalam kelompok-kelompok antidiskriminasi. Lebih jauh Chang-Yau Hoon (2012:125-126) mengategorikan berbagai generasi masyarakat Tionghoa sebagai di **dalam Tabel 1**.

Secara lebih kongkret dikatakan, yang dimaksud sebagai organisasi yang memiliki isu etnis adalah seperti PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) dan INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa), sedangkan organisasi yang berorientasi anti diskriminasi adalah SNB (Solidaritas Nusa Bangsa) dan GANDI (Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia). Organisasi-organisasi tersebut secara umum berbasis dan berpusat di Jakarta. Selain di Jakarta, berbagai organisasi masyarakat Tionghoa juga ada di berbagai daerah, termasuk Kota Surakarta.

Di Surakarta terdapat berbagai organisasi Tionghoa yang muncul pasca era

reformasi 1998. Selain Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) yang telah ada dan menjadi satu-satunya organisasi yang diakui dan diijinkan pada jaman Orde Baru, kini muncul berbagai organisasi Tionghoa yang selama Orde Baru yang lalu dilarang. Organisasi-organisasi tersebut ada yang berbasis marga seperti Himpunan Fuqing Surakarta, Perkumpulan Hoo Hap Surakarta (PHS), maupun Himpunan Persaudaraan Hakka Surakarta (Perhakkas). Di luar perkumpulan itu, muncul beberapa organisasi yang bertujuan mewadahi anak muda Tionghoa, seperti Solo *Youth club* (SYC), Hoo Hap *Youth club* (HYC), dan Komunitas Putra-Putri Hakka (Paprika).

TONGGAK AWAL: PERISTIWA MEI 1998

Bagaimana anak muda Tionghoa melihat perubahan besar yang bergulir sejak masa reformasi? Peristiwa yang turut mengiringi momentum reformasi adalah peristiwa Mei 1998. Peristiwa kekerasan dan kerusuhan pada bulan Mei 1998 yang melanda berbagai kota di Indonesia tersebut, menjadikan warga etnis Tionghoa sebagai sasaran korban. Meskipun berbagai pendapat mengatakan bahwa peristiwa tersebut bernuansa politis, artinya tidak semata-mata alamiah terjadi, namun yang jelas peristiwa tersebut telah meninggalkan trauma tersendiri bagi warga keturunan Tionghoa termasuk di Kota Surakarta.

Peristiwa yang sekaligus meninggalkan ingatan kolektif tak terlupakan bagi warga Tionghoa tersebut, ternyata tidak terlalu membuat perubahan yang berarti dalam pandangan mereka. Seperti halnya dikatakan oleh ER, seorang pengusaha muda yang juga aktif di Hoo Hap *Youth club* (HYC):

“Saya melihat sebelum dan saat setelah peristiwa ’98 itu masih sama. Warga keturunan Tionghoa belum bisa merasa

Tabel 1
Kategori Generasi Masyarakat Tionghoa
berkaitan dengan karakteristiknya dalam berorganisasi Paska 1998

Kategori	Karakteristik
Generasi Tua	Dulu pernah aktif dalam organisasi Tionghoa sayap kiri, yakni Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), sebelum ditutup pada tahun 1965, dan mengalami gerakan-gerakan anti-China dan anti-Komunis Hampir semua tokoh organisasi Tionghoa elit pada masa pasca-Suharto (misalnya PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) dan INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa) termasuk generasi ini. Konon mereka berkepentingan menghidupkan kembali hari-hari yang indah aktivisme Tionghoa pra-Suharto (Orde Baru) dan sering menggunakan Baperki sebagai titik acuan mereka.
Generasi muda	Mereka yang berusia antara 20-40 tahun. Sebagian besar duduk di bangku sekolah menengah atau universitas ketika kerusuhan anti-China dan gerakan mahasiswa berlangsung pada bulan Mei 1998. Kelompok usia inilah yang menjadi aktivis dalam kelompok-kelompok antidiskriminasi dan berbagai gerakan yang tidak berorientasi etnis pasca-1998.
Generasi yang berada di luar kelompok tersebut	Mereka yang berusia antara 40-60 tahun (seringkali disebut sebagai binatang ekonomi yang bersifat non-politis selama masa Orde Baru) Mereka yang berusia di bawah 20 tahun (seringkali disebut sebagai bagian dari generasi asuhan MTV). Umumnya bungkam dalam politik pasca-1998 karena mereka masih terlalu muda untuk memahami momentum ketika peristiwa 1965 (buat kelompok usia 40-60) dan peristiwa 1998 (buat kelompok usia di bawah 20).

Sumber: Diolah dari Chang-Yau Hoon, 2012, sebagai catatan, penelitian ini dilakukan pada tahun 2004.

aman. Sampai sekarang saya kadang-kadang masih was-was kalau pergi keluar rumah dan takut jika peristiwa tersebut terulang lagi”

Bagi ER peristiwa kerusuhan Mei 1998 meninggalkan trauma tersendiri bagi dirinya, karena ketika kerusuhan Mei 1998 terjadi, rumah tempat tinggalnya turut dijarah dan dirusak. Banyak barang-barang yang ada dalam rumahnya dibuang keluar rumah dan dibakar, sementara sebagian yang lain dijarah. Meskipun dirinya selamat, namun kejadian tersebut akan senantiasa diingatnya sebagai pengalaman buruk dan menakutkan.

Pengalaman yang hampir sama dialami oleh MD, seorang anak muda Tionghoa lain yang bekerja sebagai wiraswasta dan memilih tidak bergabung pada organisasi Tionghoa tertentu. Ketika itu ia tengah lulus SMA saat peristiwa tersebut terjadi. Rumahnya sempat dirusak. Meskipun tidak sampai terjadi korban jiwa, namun perasaan takut akan berulangnya peristiwa tersebut terus menghantuinya. Peristiwa Mei 1998

yang membawa trauma tersendiri bagi kebanyakan warga keturunan Tionghoa, di sisi lain membawa angin perubahan dengan berhembusnya reformasi. Namun era reformasi yang telah berjalan lebih dari satu dekade ini seolah tidak terlalu memberi harapan bagi warga Tionghoa seperti Md. Ia bahkan menilai tidak ada perbedaan situasi pada sebelum dan sesudah reformasi. Seperti dikatakannya:

“Menurut saya tidak ada perbedaan. Setelah 1998, meski ada tambah kebebasan, tetapi sebenarnya warga Tionghoa merasa terasing dan lebih terpinggir. Dalam banyak hal masih dibedakan.”

Lebih lanjut MD menceritakan pengalamannya ketika mengurus surat kematian orang tuanya yang baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu. Pengurusan surat kematian tersebut cenderung berbelit dan harus melalui proses birokrasi yang panjang. Sesuatu yang menurutnya berbeda sama sekali jika yang mengalami adalah bukan warga Tionghoa seperti dirinya dan keluarganya.

Perlakuan diskriminasi juga dialami oleh SW, seorang pengusaha muda Tionghoa di bidang properti. Seperti dikatakannya:

“Yang sering sekarang ini masih jadi masalah, kadang biaya sih, misalnya kita melakukan jual beli properti di daerah tertentu, itu ada cas tertentu dari pemerintah kalau kita warga keturunan...”

Era reformasi ternyata dianggap belum memberi angin perubahan bagi warga Tionghoa, seperti dikemukakan oleh beberapa anak muda di atas. Perubahan di sini dimaksudkan terutama yang berkaitan dengan persamaan hak sebagai warga negara dan juga perasaan aman dan terlindungi dalam kehidupan bernegara. Meskipun ada banyak perubahan yang terjadi secara politik setelah era reformasi bergulir, seperti halnya pencabutan larangan terhadap berbagai ekspresi dan ritual Tionghoa, pengakuan Hari Raya Imlek sebagai salah satu hari besar, dan terbukanya peluang warga Tionghoa berkiprah dalam bidang politik, namun dalam banyak kasus sehari-hari diskriminasi itu tetaplah dialami dan dirasakan oleh mereka. Pengalaman diskriminasi tersebut, seiring dengan ingatan traumatis atas peristiwa Mei 1998 pula, yang menempatkan mereka pada posisi sebagai korban kekerasan.

Pembedaan dan diskriminasi yang selalu berulang ini, berakar pada cara pandang yang beku terhadap keberadaan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Hal ini memang tak bisa dilepaskan kaitannya dengan pandangan masyarakat non Tionghoa terhadap etnis Tionghoa. Seperti dikatakan oleh Asvi Warman Adam (2003) bahwa etnis Tionghoa dalam ingatan kolektif masyarakat nonTionghoa selalu ditempatkan sebagai *the other*. Selain itu, menurut Jemma Purdey, kekerasan terhadap etnis Tionghoa seolah menjadi sesuatu yang dianggap normal dan selalu berulang

di Indonesia karena hal tersebut sering dimanfaatkan sebagai kambing hitam, di samping itu para pelakunya tidak pernah akan jera karena seolah ada impunitas, atau sebuah perasaan tidak bersalah dan kebal hukum (Jemma Purdey,2005:33).

ANAK MUDA TIONGHOA: TRADISI YANG TAK LAGI DIKENAL

Generasi anak muda Tionghoa sekarang secara umum sebenarnya adalah mereka yang tidak lagi mengenal tradisi dan adat kebiasaan leluhur mereka. Mereka digambarkan sebagai generasi yang cenderung kehilangan kemahiran berbahasa Tionghoa, tidak paham tradisi, dan sebagian dari mereka bersekolah di luar negeri. Mereka cenderung melihat diri mereka sebagai ‘golongan menengah yang professional’ daripada sebagai ‘keturunan Tionghoa’ (Thung Ju Lan, 2001:187).

Perasaan tidak lagi mengenal tradisi dan kebiasaan leluhur ini seperti halnya dikemukakan oleh MD berikut:

“Ibu saya masih tahu hitung-hitungan dan tata cara berdoa pada leluhur. Kalau saya sudah gak tahu. Paling tradisi yang masih saya lakukan ya Imlek, itu kumpul keluarga makan bersama. Kalau bahasa, saya juga sudah gak begitu bisa, paling mendengarkan, tapi itupun hanya sedikit paham....”

MD yang sudah berkeluarga, sedikit masih mengenal beberapa tradisi karena kebetulan masih tinggal dengan Ibunya yang sudah berusia hampir 70-an dan masih mempraktekkan berbagai tradisi Tionghoa. Meskipun secara umum bisa dikatakan bahwa ia sudah tak bisa melakukan sendainya hanya dirinya sendiri yang melakukan.

Sementara itu SW, seorang pengusaha bidang properti menceritakan pengalamannya ketika menonton pertunjukan ba-rongsai:

“Ketika nonton barongsai bagi saya ya nggak ada perasaan khusus atau ingatan tertentu, ya seperti yang lain rasanya melihatnya sebagai hiburan, seperti entertainment saja. Soalnya kan kita nggak pernah mengalami di daerah asalnya. Malah saya belum pernah ke sana (Cina maksudnya). Secara habitat, saya ya sama dengan orang sini, wong mau beli krupuk ya pakai bahasa Jawa ngoko. Jadi nggak ada perasaan atau ingatan khusus saat melihatnya.”

Pernyataan SW memperlihatkan bagaimana anak muda Tionghoa saat ini memang benar-benar tak lagi memiliki ingatan atau relasi psikologis yang khusus terhadap berbagai atraksi kesenian berlabel kesenian Tionghoa yang sering ditampilkan pada masa pasca reformasi saat ini. Pengalamannya menonton pertunjukan barongsai barangkali akan sama persis dengan yang dirasakan oleh orang Jawa atau Sunda misalnya yang menonton hal yang sama. Tidak ada sesuatu yang istimewa atau khusus dari hal tersebut. Gejala seperti ini bisa dikatakan merupakan gejala umum

yang dialami oleh anak muda Tionghoa di Indonesia.

Selain karena mereka tak dilahirkan di negeri Cina, seperti halnya orang tua atau kakek nenek mereka, kebijakan asimilasi Orde Baru yang melarang dan memangkas memangkas habis seluruh ekspresi kebudayaan Tionghoa di Indonesia menjadi factor lainnya. Di luar hal tersebut, banyak dari mereka yang telah mengenyam pendidikan di barat. Hal tersebut turut membentuk identitas mereka sebagai anak muda yang professional dan mengejar karier dan individualis, sesuatu yang seringkali bertentangan dengan tradisi Tionghoa yang mengutamakan bakti kepada keluarga dan leluhurnya (Thung Ju Lan, 200:181-182).

Oleh Thung Ju Lan (2001) digambarkan pula bagaimana anak muda Tionghoa seperti halnya MD dan SW ini sebenarnya hanya memiliki identitas Tionghoa secara biologis (sebagai keturunan) dan tidak secara budaya. Adapun identitas secara budaya itu akan senantiasa bergerak dan mengkonstruksi diri, tanpa ada sesuatu yang

Tabel 2
Jenis Organisasi Sosial Tionghoa di Jakarta yang Muncul Paska 1998

JENIS ORGANISASI	JUMLAH
Organisasi Berdasarkan Marga Tionghoa	78
Organisasi Daerah Leluhur di Tiongkok	19
Organisasi Daerah Leluhur di Indonesia	
Yayasan Belitung Mulia	1
Alumni Sekolah Tionghoa	19
Alumni Sekolah National University of Singapore (NUS)	1
Alumni Sekolah di Taiwan	1
Alumni Sekolah di Tiongkok	1
Organisasi Masyarakat	
Organisasi Bidang Ekonomi	5
Lembaga Penelitian Masyarakat Tionghoa Indonesia	8
JUMLAH	178

Sumber: Daftar Marga Tionghoa di Indonesia dipublikasikan oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia dalam I.Wibowo (ed), 2010:62

fix atau tetap. Sayangnya, dalam banyak kasus semua orang keturunan Tionghoa dianggap memiliki orientasi budaya yang sama persis atau homogen, tunggal dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Hal ini akan memperkuat *stereotype* yang beku terhadap masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia.

ORGANISASI ANAK MUDA TIONGHOA DI SURAKARTA

Paska runtuhnya Orde Baru, terjadi *boom-ing* organisasi Tionghoa di Indonesia. Hal ini menjadi respon atas pengekangan kebebasan organisasi bagi masyarakat Tionghoa selama Orde Baru. Menurut catatan PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia), terdapat 176 organisasi sosial Tionghoa di Jakarta (Aimee Dawis dalam Wibowo 2010:61). Gambaran detil tentang organisasi-organisasi tersebut dapat dilihat dengan **menyimak Tabel 2**.

Di luar data tersebut, terdapat pula data dari Eddie Kusuma, seorang aktivis sosial yang mendukung pluralisme dan Ketua Perkumpulan Marga Wu, yang menyebutkan bahwa jumlah organisasi Tionghoa di Indonesia bisa mencapai 540 pada tahun 2008, dengan berbagai klasifikasi seperti organisasi yang berdasarkan nasionalisme, partai politik, organisasi yang berdasarkan kelompok bahasa, berdasarkan kesamaan nama keluarga, berdasarkan kesamaan daerah asal di Tiongkok, berdasarkan kesamaan visi Indonesia-Tionghoa, alumni sekolah menengah Tionghoa, perkumpulan keagamaan, dan organisasi yang berdasarkan kesamaan minat dan aktivitas (Aimee Dawis, 2010:63-64).

Hal yang menarik adalah jumlah anak muda Tionghoa yang tergabung dalam organisasi-organisasi tersebut sangatlah sedikit. Hal ini dikarenakan perbedaan minat mereka dengan generasi orang tua mereka yang menganggap penting organisasi Tionghoa

untuk memperkuat identitas dan eksistensi mereka (Aimee Dawis, 2010:69).

Sementara itu, beberapa perkumpulan atau organisasi Tionghoa yang bermunculan paska Mei 1998, menjadi pertanda geliat dan gerak warga Tionghoa dan anak muda Tionghoa di Surakarta. Hampir sama dengan berbagai organisasi yang disebutkan di atas, ciri khas dari kegiatan tersebut menurut mereka adalah berorientasi pada kegiatan sosial dan non profit. Berbagai kegiatan seperti bakti sosial, pembuatan taman belajar, sampai dengan *jobfair*, telah dilakukan oleh berbagai kelompok ini sejak beberapa tahun terakhir ini. Dengan aktivitas seperti itu mereka ingin menyapa, berdialog, sekaligus menunjukkan diri kepada komunitas lain yang lebih luas, khususnya non Tionghoa di lingkup Kota Surakarta. Melalui wadah ini pula, dengan menyebut diri sebagai kalangan “youth”, secara tak langsung juga ingin menunjukkan bagaimana generasi muda Tionghoa memiliki warna dan kiprah tersendiri, yang barangkali akan berbeda dengan generasi Tionghoa sebelumnya.

Berikut ini adalah deskripsi tentang dua organisasi “anak muda” Tionghoa di Kota Surakarta, yaitu Solo *Youth club* dan Hoo Hap *Youth club*. Dua organisasi tersebut muncul pada masa paska Orde Baru.

SOLO YOUTH CLUB: DARI REGENERASI SAMPAI JARINGAN USAHA

Solo *Youth club* (SYC) merupakan organisasi yang berada di bawah atau menjadi bagian dari Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS), sebuah organisasi Tionghoa terbesar di Surakarta. PMS merupakan satu-satunya organisasi Tionghoa yang tidak dilarang ketika pemerintah Orde Baru berkuasa, sementara beberapa organisasi lain yang mengusung identitas kesukuan atau marga Tionghoa seperti Perhakkas (Perkumpulan Hakka Surakarta), Perkum-

pulan Hoo Hap Surakarta (PHS), Himpunan Fuqing, adalah organisasi-organisasi yang dilarang selama masa Orde Baru. Pasca keruntuhan Orde Baru, organisasi-organisasi tersebut muncul kembali. Dibandingkan dengan organisasi Tionghoa yang berdasarkan marga seperti di atas, PMS merupakan organisasi yang lebih inklusif dan mewadahi seluruh masyarakat Tionghoa tanpa membedakan suku atau marganya.

PMS sendiri sebagai sebuah organisasi Tionghoa di Surakarta, memiliki sejarah yang panjang. Dimulai sejak jaman kolonial tahun 1932 dengan nama Chuan Min Kung Hui (CMKH) hingga berubah nama menjadi Perkumpulan Masyarakat Surakarta di jaman Orde Lama (1959). Perdebatan tentang asimilasi dan integrasi bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia menguat sejak masa akhir Orde Lama dan awal Orde Baru. Dalam hal ini PMS sempat dekat dengan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang cenderung berorientasi integrasi, namun kemudian setelah peristiwa 1965, PMS lebih dekat ke LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) yang cenderung berorientasi asimilasi¹. Bahkan selama Orde Baru, melalui pentas Wayang Orang yang menjadi bagian dari kegiatan PMS, digambarkan bagaimana kedekatan PMS dengan Golkar pada masa Orde Baru. Hal inilah yang barangkali menjadi alasan, mengapa PMS sebagai organisasi Tionghoa di Surakarta tidak dilarang pada masa Orde Baru (Rustopo, 2007:87-88).

Solo *Youth club* sebagai organisasi di bawah payung dari PMS, menyebut diri sebagai organisasi anak muda. Dalam profil organisasi yang tertuang dalam *website* SYC disebutkan bahwa:

“Solo Youth club adalah forum komunikasi pengusaha/professional muda Solo Raya yang merupakan salah satu divisi kegiatan Bidang Kepemudaan Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS), dengan semangat Wirausaha yang peduli terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan, serta ikut berpartisipasi aktif mensukseskan pembangunan daerah sesuai bidang kegiatannya yang meliputi: ekonomi, sosial dan budaya”. (www.soloyouthclub.com)

Adapun logo SYC berbentuk bola dunia dengan lima bintang dan kepulauan Indonesia dirumuskan memiliki makna dan harapan bahwa:

“Anggota Solo Youth club adalah Warga Negara Indonesia, yang berperan aktif dalam pembangunan dan selalu mengembangkan kemampuan diri dalam menghadapi persaingan global” (www.soloyouthclub.com)

Lebih lanjut dikatakan bahwa sifat organisasi SYC sebagai organisasi kemasyarakatan adalah Non Pemerintah, Non Politik dan Non Profit. SYC terbentuk sejak tahun 2007 atas inisiatif pengusaha muda Tionghoa bernama Tanu Kismanto, yang juga menjabat Seksi Kepemudaan Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) sejak tahun 2005. Menurutnya, tujuan pembentukan SYC adalah mewadahi potensi-potensi pemuda Solo yang mau berusaha. SYC juga bertujuan untuk menjadi wadah saling bertukar informasi. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukannya, tujuannya agar etnis Tionghoa semakin dekat dengan masyarakat dan dapat diterima seperti masyarakat lain tanpa membeda-bedakan.

Adapun menurut SW, salah seorang pengurus SYC lainnya mengatakan bahwa:

“Tujuan dibentuknya SYC itu kan awalnya PMS itu kan mulai tua-tua ya, mereka usianya sudah 50-60an, jadi generasi mudanya itu kan nggak ada. Jadi

1 Untuk penjelasan lebih jauh tentang BAPERKI dan LPKB dan perdebatan tentang asimilasi dan integrasi lihat Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, 1984:62-71 dan Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, LP3ES, 2001, hal.15-17.

tujuannya untuk regenerasi PMS. Selain itu tujuannya untuk mengumpulkan pengusaha-pengusaha muda Solo agar punya jaringan. Kalau butuh rumah bisa sama si A, kalau butuh kacang bisa sama si B, kalau butuh sembako bisa sama si C, dan sebagainya. Jadi biar ada link-nya gitu....”

Ungkapan SW secara tak langsung memperlihatkan bagaimana jaringan usaha di kalangan masyarakat Tionghoa khususnya, menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga selagi mereka masih muda perlu dikenalkan agar bisa berjaringan satu sama lain. Di sisi yang lain, regenerasi PMS, sebuah organisasi Tionghoa terbesar di Kota Solo, menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi komunitas Tionghoa di Surakarta. Terasa adanya sebuah kebutuhan untuk menjaga eksistensi PMS sebagai sebuah ikon masyarakat Tionghoa di Kota Solo selama ini melalui regenerasi di kalangan anak muda Tionghoa.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan SYC selama lima tahun terakhir ini antarlain: bakti sosial, seminar, pentas musik, donor darah sampai dengan job fair. Jumlah anggota SYC keseluruhan adalah sekitar 200-an, namun yang aktif hanya sekitar 30-an (wawancara dengan SW).

Diakui oleh SW bahwa kegiatan SYC selama ini memang bersifat insidental. Seperti dikatakannya:

“Memang tujuan kita sejauh ini memang membuat acara-acara yang bersifat insidental. Lebih ke even. Pengin buat acara apa, ayo kita lakukan, daa setelah itu ya sudah kalau selesai pembubaran panitia. Tujuannya mengumpulkan orang banyak. Bukan kegiatan yang sifatnya kontinyu dan berkelanjutan..”

Dengan sifat kegiatan yang seperti itu, berbagai kegiatan yang telah dilakukan seperti bakti sosial misalnya, akhirnya memang lebih bersifat sekali jadi dan

tidak berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya “sekali jadi” tersebut misalnya kegiatan donor darah yang hasilnya diberikan kepada PMI (Palang Merah Indonesia), bakti sosial berupa mendatangkan putri Indonesia ke sebuah SLB (Sekolah Luar Biasa) di Surakarta untuk memberikan motivasi ke murid-murid dan hanya dilaksanakan sehari itu juga dan seterusnya. Dalam konteks ini, pengertian “kegiatan sosial” bisa dikatakan lebih bersifat karitatif dan tidak memikirkan efek jangka panjang atau berkelanjutan.

Sedangkan berkaitan dengan motivasi individu untuk bergabung dengan SYC, SW salah seorang anggota SYC mengatakan bahwa:

“Saya berasal dari Salatiga dan baru beberapa tahun tinggal di Solo. Usaha properti saya baru dua tahun ini jalan. Kalau saya nggak bergabung dalam organisasi, nanti saya nggak akan dikenal. Kalau ikut organisasi kayak SYC ini, kan jadi dikenal dan ada yang menggaransi kalau nanti ada yang tanya tentang saya dan usaha saya.”

Ungkapan SW berikut ini memperlihatkan bagaimana salah satu motivasinya untuk bergabung dengan SYC adalah untuk memperluas dan memperkuat jaringan bisnis yang sedang dirintisnya. Dengan bergabung dengan SYC, ia akan dikenal dan memiliki jaringan dengan para pengusaha di kota Surakarta lainnya, sehingga akan sangat membantunya dalam mengembangkan usaha.

HOO HAP YOUTH CLUB: KEGIATAN SOSIAL

Adapun Hoo Hap Youth club (HYC) adalah organisasi anak muda yang berada di bawah naungan Perkumpulan Hoo Hap Surakarta (PHS). PHS sendiri adalah salah satu organisasi etnis Tionghoa di Solo

yang didasarkan pada keturunan suku Min Nan dan Tio Ciu. Min Nan berarti Hok Kian bagian selatan. Golongan Min Nan juga banyak beremigrasi ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mereka sering dipanggil keturunan Hok Kian di Indonesia. Sedangkan Tio Ciu merupakan daerah yang terletak di propinsi Guang Zhou dan berdekatan dengan daerah suku Minan di Hok Kian selatan (PHS,2002:4).

HYC berdiri tahun 2005, tepatnya tiga tahun setelah Perkumpulan Hoo Hap Surakarta resmi didirikan kembali tahun 2002, setelah selama masa Orde Baru yang lalu semua bentuk organisasi Tionghoa dilarang oleh rejim yang berkuasa ketika itu. Anggota yang bergabung dalam HYC menurut EA, salah seorang aktivisnya, berjumlah sekitar 100 orang dengan rentang usia sekitar 20-30 tahun.

Menurut EA, kegiatan utama HYC lebih banyak bersifat sosial, seperti memberikan bantuan saat terjadi peristiwa bencana alam (seperti pada saat Gempa Bumi di Yogyakarta tahun 2006 yang lalu). Selain itu yang masih rutin dan berjalan sampai sekarang adalah memberikan bimbingan belajar bagi warga miskin (terutama anak-anak) di beberapa kampung di Kota Solo. HYC memiliki setidaknya tiga taman belajar di Kota Solo yang masih berjalan sampai sekarang, antarlain berlokasi di Nonongan, Sekarpace, dan Panggungrejo. Bimbingan belajar dilaksanakan dua kali seminggu di masing-masing taman belajar, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat dari pukul 18.30-20.00. Pelajaran yang disampaikan meliputi hampir semua mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar, kecuali mata pelajaran agama.

Bukan hal yang mudah untuk melakukan kegiatan taman belajar di kampung. Meski saat ini sudah berjalan selama tujuh tahun, namun pada awal perintisan kegiatan ini, pihak HYC tidaklah mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Seperti dikisahkan oleh EA, ketua HYC berikut:

“Pendirian taman belajar ini awalnya sangat sulit bahkan tidak disetujui oleh warga sekitar. Warga takut jika kami mencuci otak anak-anak mereka. Namun kami terus mensosialisasikan dan memberikan pengarahan. Kami menemui perangkat-perangkat desa, kami menjelaskan apa tujuan kami membentuk taman belajar ini, kemudian kami membuat surat persetujuan yang berisi apa tujuan kami dan jika warga tidak setuju tidak ikut tidak apa-apa. Pertama kita mulai mengajar itu yang datang hanya 3 anak atau 5 anak. Tapi kami tidak putus asa, kami terus mengajar. Setiap kami mengajar ada warga yang mengintip apa yang kami ajarkan ke anak-anak kemudian lambat laun mereka mengikutkan anaknya untuk ikut les di tempat kami”.

Sikap curiga terhadap kehadiran warga keturunan Tionghoa di kampung mereka sekaligus menunjukkan bagaimana jarak sosial itu memang ada dan terus berlanjut sampai sekarang. Kecurigaan tersebut juga sering dikaitkan dengan soal penyebaran agama, dimana warga Tionghoa selama ini lebih diidentikkan sebagai beragama non muslim.

Kegiatan taman belajar sekarang ini secara teknis di lapangan dilaksanakan oleh para mahasiswa dan mahasiswi non Tionghoa yang berasal dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kota Surakarta. Mereka adalah para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Hoo Hap, sebagai kewajibannya mereka harus mengajar di taman belajar tersebut. Dalam sebuah observasi yang dilakukan, tampak bahwa kegiatan taman belajar tersebut dilaksanakan dengan menumpang di sebuah bangunan sekolah taman kanak-kanak dan di setiap akhir bimbingan belajar kepada para siswa dibagikan susu dan mie kremes.

“Eksperimen” kegiatan yang dilaksanakan oleh HYC ini menarik untuk dicermati karena berbeda dengan SYC yang kegiatannya lebih bersifat eventual dan sekali jadi, kegiatan taman belajar HYC lebih bersifat jangka panjang. Program tersebut telah dilaksanakan secara rutin dan berlangsung selama beberapa tahun. Yang menarik adalah sisi karitatif tetap muncul dalam kegiatan ini, yaitu berupa pemberian susu dan mi instan di setiap akhir proses pembelajaran.

Pola pemberian bantuan secara karitatif ini menurut saya menjadi pola di banyak organisasi atau perkumpulan Tionghoa di Surakarta khususnya. Sebagai perbandingan, penelitian yang dilakukan oleh Yosafat Hermawan Trinugraha (2010) tentang PAGARI (Paguyuban Warga Peduli), sebuah paguyuban yang beranggotakan warga Tionghoa dan Jawa di sebuah kampung di Kota Surakarta, juga memiliki pola kegiatan serupa, yaitu memberi bantuan orang miskin berupa sembako maupun peralatan sekolah. Selain itu, sebuah organisasi baru di Kota Surakarta bernama Solo Bersama Selamanya, yang anggotanya campuran dari berbagai ormas di Kota Surakarta (termasuk ormas Tionghoa), memiliki kegiatan rutin pula pembagian sembako menjelang hari Lebaran setiap tahunnya. Mereka juga member bantuan berupa makanan atau barang-barang lainnya ketika terjadi bencana alam di berbagai tempat (seperti banjir di Kota Solo maupun letusan Gunung Merapi) (Buletin PMS,2012).

Niat baik untuk mendekatkan diri maupun melebur jarak sosial antara warga Tionghoa dan bukan Tionghoa tentu bukan sesuatu yang keliru. Namun menjadi masalah dan menarik untuk didiskusikan lebih lanjut menyangkut cara-cara yang dilakukan. Apakah dengan cara-cara karitatif tersebut telah benar-benar melebur jarak sosial antara warga Tionghoa dan non Tionghoa?

POLITIK IDENTITAS SYC DAN HYC

SYC dan HYC adalah dua organisasi anak muda Tionghoa yang muncul pada masa pasca Orde Baru di Surakarta. Keduanya menjadi semacam *euphoria* bagi warga keturunan Tionghoa yang selama Orde Baru terkekang karena pelarangan untuk mendirikan organisasi. Isu “anak muda” yang diusung dalam kedua organisasi ini menarik untuk dicermati, karena secara tidak langsung menunjukkan pentingnya keberadaan anak muda bagi masyarakat Tionghoa.

Sedangkan jika dilihat dalam konteks politik identitas, kemunculan SYC dan HYC merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh anak muda Tionghoa dalam rangka membuat wacana tanding terhadap wacana besar dan *stereotype* yang selama ini diberikan kepada masyarakat Tionghoa di Indonesia dan telah berakar sejak jaman kolonial sebagai komunitas yang dianggap eksklusif, berjarak, bukan warga asli, dan tidak bisa membaur. Dengan berbagai kegiatan sosial yang mereka lakukan seperti bakti sosial, *jobfair*, maupun taman belajar, mereka berusaha menghadirkan identitas lain di luar identitas yang selama ini dilabelkan kepada mereka.

Meskipun jika kita cermati lebih jauh, representasi identitas yang hendak ditawarkan sebagai tandingan akan sangat mungkin terjebak dalam kerangka identitas yang esensial, yakni justru semakin melanggengkan dikotomi antara “orang Tionghoa” dan “non Tionghoa”, ataupun antara “pendatang” dan “orang asli” yang diasumsikan telah memiliki identitas yang final dan tidak berubah (Chang-Yau Hoon,2012:14-20). Artinya di sini dengan sejak awal menganggap saya sebagai Tionghoa atau bukan Tionghoa, sehingga saya harus berperilaku sesuai identitas yang saya diharapkan oleh masyarakat, hal itu berarti secara otomatis mengakui identitas yang bersifat esensial, bukan sebuah iden-

titas yang terkonstruksi secara terus-menerus, plural dan akan sangat mungkin terus berubah.

Kedua, dengan mengusung istilah “youth”, Solo *Youth club* sendiri berusaha menunjukkan eksistensi identitasnya sebagai anak muda, yang memang harus dibedakan dengan orang tua. Seperti halnya dinyatakan dalam sebuah artikel berjudul “Ingin PMS tampil Lebih Muda” yang termuat dalam Buletin PMS edisi 19/Desember 2011-Februari 2012, bahwa SYC memang terbentuk dari inisiatif anak muda Tionghoa dan dalam perkembangannya disetujui oleh para pengurus PMS yang notabene adalah generasi tua masyarakat Tionghoa di Surakarta. Dalam prosesnya, beberapa pengurus PMS yang dianggap lebih senior, dianggap benar-benar memberi ruang gerak berekspresi bagi anak-anak muda Tionghoa yang tergabung dalam SYC. Dalam konteks yang sama tentunya juga dialami pada HYC.

Namun demikian dalam berbagai usaha menampilkan berbagai identitas tersebut, tentu terdapat berbagai paradoks. Pertama, seperti disebutkan di atas selain sangat potensial terjebak dalam cara pandang esensialis, usaha membuat wacana tanding untuk menghadirkan berbagai identitas alternatif tersebut, baik SYC maupun HYC masih terjebak pada bentuk-bentuk kegiatan sosial yang sifatnya karitatif. Hal ini entah disadari atau tidak akan menjebak dan melanggengkan stereotype atas posisi mereka sebagai warga yang lebih tinggi secara ekonomi, melalui pembagian dan pemberian berbagai materi kepada mereka yang dianggap membutuhkan.

Sebuah catatan menarik dikemukakan Beni Setiono dalam Aimee Dawis (2010) yang memberi kritik terhadap sebuah organisasi Tionghoa di Jakarta, *Young Entrepreneur Council* (YEC) yang menjadi bagian dari Perhimpunan INTI Jakarta. Ia mengemukakan bahwa organisasi tersebut

jika tidak berhati-hati akan terjebak sebagai perkumpulan bisnis, karena mereka justru lupa kepada usaha pemberdayaan rakyat kecil dan menengah. Mereka (YEC) juga disarankan untuk melakukan kegiatan menularkan filosofi bisnis Tionghoa kepada orang Indonesia, sehingga akan mengurangi dan menghapus *stereotype* eksklusif di kalangan masyarakat Tionghoa.

Gagasan dan kritik Beni Setiono di atas dapat dilihat sebagai salah satu usaha agar niat baik berbagai organisasi Tionghoa muda tersebut tidak menjadi sebuah hal yang sia-sia dan tidak berguna. Dalam hal ini perlu dimunculkan wacana-wacana alternatif tentang bentuk kegiatan sosial yang seharusnya dilakukan oleh organisasi-organisasi Tionghoa yang ada, sehingga tidak terjebak pada pola karitatif yang terus berulang dan sebenarnya tidak mendidik masyarakat miskin tersebut.

Berkaitan dengan isu “youth” yang merupakan usaha menghadirkan identitas anak muda pada komunitas Tionghoa, paradoks yang dimungkinkan muncul adalah bagaimana organisasi anak muda Tionghoa tersebut akan “didikte” oleh generasi tua yang ada dalam organisasi tersebut. Sebuah catatan diberikan oleh Chang You Hoon (2012:130-131) yang mengatakan bahwa sangat mungkin terjadi relasi kuasa antara generasi muda dan generasi tua dalam sebuah organisasi Tionghoa. Anak-anak muda seperti berada pada posisi yang dikuasai oleh mereka yang lebih tua karena mereka (generasi tua ini) lebih memiliki modal finansial dan fasilitas, di samping seringkali terjadi mereka dianggap kurang memahami kepentingan golongan muda. Dalam konteks ini, SYC dan HYC keduanya menginduk atau berpayung pada dua organisasi besar yang sudah ada, yaitu PMS (Perkumpulan Masyarakat Surakarta) dan PHS (Perkumpulan Hoo Hap Surakarta). Sangat mungkin sekali bahwa SYC dan HYC tersebut benar-benar patuh dan dalam

posisi subordinat terhadap organisasi induk yang notabene berisikan para orang tua Tionghoa.

Di samping kehadiran berbagai identitas beserta paradoksnya seperti di atas, maka menarik juga memahami makna bahwa seseorang rela bergabung dalam SYC maupun HYC. Seperti halnya diakui SW di atas, bahwa dengan menggabungkan diri dengan organisasi-organisasi tersebut, sebagai orang yang belum memiliki jam terbang tinggi dan sebagai pengusaha baru di Kota Surakarta, maka ia akan dikenal dan memiliki jaringan di kalangan para pengusaha di Solo. Dengan kata lain dengan bergabung dengan SYC, peluang untuk memperkuat dan memperbesar bisnisnya akan semakin terbuka lebar. Hal ini memperlihatkan bahwa dengan bergabungnya anak muda Tionghoa ke dalam SYC maupun HYC adalah sebuah politik identitas agar diakui sebagai pengusaha dan warga keturunan Tionghoa, sehingga memperkuat jejaring bisnis mereka di antara kalangan Tionghoa sendiri.

PENUTUP

Menjadi anak muda Tionghoa di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Mereka berada dalam cengkeraman sosial karena tak bisa lepas dari berbagai label dan *stereotype* yang telah hidup dan berkembang sejak ratusan tahun di negeri ini. Label dan *stereotype* itu membuat mereka dibedakan dan didiskriminasikan di berbagai bidang dalam masyarakat Indonesia. Padahal secara nyata mereka telah mengidentifikasi diri sebagai individu maupun kelompok yang plural dan terus bergerak dan berubah, bukan sebagai sebuah individu maupun kelompok yang yang tunggal dan seolah-olah sudah final.

Melalui organisasi dan kelompok yang berlabelkan anak muda Tionghoa (seperti Solo *Youth club* dan Hoo Hap *Youth*

club), mereka mencoba berstrategi dengan menghadirkan identitas yang lain sebagai kelompok Tionghoa yang tidak eksklusif dan memiliki kepedulian sosial. Selain itu penggunaan istilah “youth” dalam SYC maupun HYC merupakan usaha menghadirkan eksistensi anak muda Tionghoa beserta lingkup permasalahannya yang kompleks.

Meski demikian terdapat berbagai paradoks yang mengiringi hal-hal tersebut di atas seperti seperti potensi untuk terjebak dalam cara pandang yang esensial dan cara-cara karitatif yang akan sangat mungkin memperkuat hal tersebut.

Meskipun demikian SYC dan HYC merupakan sebuah usaha strategi politik identitas yang dilakukan oleh anak muda etnis Tionghoa di Surakarta pasca Orde Baru dalam menghadapi berbagai *stereotype* yang terlanjur melekat dari waktu ke waktu tanpa mereka sendiri tak bisa menolaknya. Usaha-usaha kreatif lainnya tentu saja masih diperlukan, agar tidak terjebak dalam berbagai paradoks seperti di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Buku Kenangan Peresmian Perkumpulan Hoo Hap Surakarta, PHS, Surakarta, 2002.
- Adam, Asvi Warman, *The Chinese in the Collective Memory of the Indonesian Nation*, http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp/issue/issue2/article_244.html, didownload 2 November 2012
- Barker, Chris, *Cultural Studies Teori dan Praktik*, terjemahan Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004
- Dawis, Aimee, Orang Tionghoa Berorganisasi, Yang Kini Lanjutan dari Masa Lalu? dalam I. Wibowo dan Thung Ju Lan (ed), *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*, Penerbit Buku Kompas, 2010

- Dawis, Aimee, *Orang Tionghoa Indonesia Mencari Identitas*, Gramedia, Jakarta, 2010
- Giddens, Anthony, *Sociology*, Polity Press, 1993
- Hoon, Chang You, *Identitas Tionghoa Pasca Suharto: Budaya, Politik dan Media*, LP3ES dan Yayasan Nabil, Jakarta, 2012
- Purdey, Jema, Anti-Chinese Violence and Transitions in Indonesia: June 1998-October 1999, dalam Tim Lindsey dan Helem Pausacker (ed), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, ISEAS Singapore, 2005
- Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa*, Ombak Press, Yogyakarta, 2007
- Suryadinata, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Grafitipres, Jakarta, 1984
- Suryadinata, Leo, *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001
- Thung Ju Lan, *Susahnya Jadi Orang Cina: Ke-Cina-an sebagai Konstruksi Sosial*, dalam I Wibowo (ed), *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2001
- Trinugraha, Yosafat Hermawan, *Wacana dan Praktik Pembauran pada Masyarakat Etnis Tionghoa dan Jawa Pasca Orde Baru (Studi Kasus Paguyuban Warga Peduli (PAGARI) di Kampung Kebalen, Kelurahan Kampung Baru, Kota Surakarta)*, tesis Pascasarjana Sosiologi UGM